

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tugas kepala desa sebagai kepala pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa. Permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan antara lain. *Pertama*, bagaimana tugas Kepala Desa Menguneng dalam pembangunan desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?. *Kedua*, apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Menguneng dalam melaksanakan tugas pembangunan desa? Serta bagaimana upaya mengatasinya?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal melalui peraturan Perundang-Undangan dan konseptualisme, yang dapat diuraikan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang menggunakan konsep legis positivis yang mengkaji seluruh peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, *pertama* Tugas kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kendala yang dihadapi kepala Desa Menguneng; berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, ketidaktepatan (sasaran, target, output, kebutuhan besaran anggaran) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan anggaran Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata.

Kata Kunci: Kepala desa; pembangunan desa; UU Nomor 6 Tahun 2014

ABSTRACT

Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, village development is an effort to improve the quality of life and life for the greatest welfare of village communities. The village head's duties as head of the village government greatly influence the ongoing development process in the village. The problems in this writing can be formulated, among others. First, what are the duties of the Menguneng Village Head in village development based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages? Second, what obstacles does the Menguneng Village Head face in carrying out village development tasks? And how to overcome it?

The approach method used in this research is a doctrinal approach through statutory regulations and conceptualism, which can be described as the Statute Approach which uses a positivist legal concept which examines all statutory regulations, the Conceptual Approach (Conceptual Approach) approach method by referring to legal principles. The data used in this research is secondary data, namely data obtained from library materials. The method used to analyze and process the collected data is qualitative analysis.

Based on the research results, firstly, the duties of the village head are regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of this research conclude, Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Village Authority includes authority in the field of administering Village Government, implementing Village development, developing Village communities, and empowering Village communities. Obstacles faced by the head of Menguneng Village; based on community initiative, origin rights and village customs, inaccuracies (goals, targets, outputs, budget size requirements) in the implementation of development planning and budgets Regional development planning can be implemented well, if supported by adequate financial capacity and funding allocation that is fair and equitable.

Keywords: Village head; village development; Law Number 6 of 2014